

Penguatan Literasi Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Politik di Kalangan Mahasiswa PPKn

Sanctissima Trinitas Gute Kothen¹, Brampi Soniman Sae², Inriwati Ora³, Tropina Kareri Hara Toga⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
ktryas73@gmail.com

Submit	Review	Publish
27 November 2025	29 November 2025	19 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan politik dalam memperkuat literasi kewarganegaraan mahasiswa PPKn melalui praktik pembelajaran yang dialogis, analitis, dan berorientasi pada isu-isu publik kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan analisis dokumen, observasi tidak langsung, dan studi literatur sebagai dasar untuk menelaah efektivitas implementasi pendidikan politik dalam konteks perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum, strategi pembelajaran berbasis diskusi dan analisis kasus, serta keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas kokurikuler mampu meningkatkan kapasitas analitis, memperluas pemahaman konseptual tentang kewarganegaraan, dan membentuk disposisi kewarganegaraan yang kritis dan reflektif. Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam forum musyawarah dan organisasi kemahasiswaan berkontribusi pada pengayaan pengalaman politik yang memperkuat literasi kewarganegaraan secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan politik berbasis isu, ketika ditopang oleh budaya akademik yang demokratis dan partisipatif, memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan literasi kewarganegaraan mahasiswa secara menyeluruh. Rekomendasi penelitian menggaris bawahi perlunya pengembangan kurikulum yang responsif terhadap dinamika sosial-politik, penguatan metode pembelajaran partisipatoris, serta penciptaan ekosistem kampus yang kondusif bagi praktik demokrasi dan partisipasi warga negara.

Kata kunci: literasi kewarganegaraan, pendidikan politik, mahasiswa PPKn.

Abstract

This study aims to analyze the role of political education in strengthening civic literacy among PPKn (Civic Education) students through dialogic, analytical, and issue-based learning practices. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing document analysis, indirect observation, and literature review to examine the effectiveness of political education implementation within the higher education context. The findings indicate that the integration of political education into the curriculum, the use of discussion-driven and case-based instructional strategies, and student engagement in co-curricular activities significantly enhance analytical capacities, broaden conceptual understanding of citizenship, and foster critical and reflective civic dispositions. Moreover, students' participation in deliberative forums and student organizations enriches their political experience, thereby contributing substantively to the development of their civic literacy. The study concludes that issue-based political education, when supported by a democratic and participatory academic environment, plays a significant role in advancing students' comprehensive civic literacy. The study recommends the development of curricula that are responsive to socio-political dynamics, the strengthening of participatory pedagogical approaches, and the cultivation of a campus ecosystem conducive to democratic practices and active civic participation.

Keywords: civic literacy, political education, PPKn students.

PENDAHULUAN

Literasi kewarganegaraan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara untuk menghadapi perubahan di bidang politik, sosial, dan teknologi. Di masa kini yang penuh dengan informasi palsu, perpecahan politik, dan aliran informasi yang cepat, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) punya peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Mereka harus mampu berpikir kritis, memahami proses politik, serta berpartisipasi secara bijak (Milner, 2010). Makin pentingnya literasi kewarganegaraan terlihat karena mahasiswa PPKn akan menjadi calon guru dan agen perubahan yang akan membentuk kemampuan kewarganegaraan generasi mendatang. Namun, perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan besar terhadap kualitas literasi kewarganegaraan. Meskipun akses informasi semakin mudah, hal ini justru bisa memperluas wawasan politik sekaligus meningkatkan risiko terpapar informasi yang tidak netral, manipulatif, sensasional, dan penuh emosi. Mahasiswa yang kurang memiliki literasi kewarganegaraan yang baik akan kesulitan memahami isu publik dan berpotensi menyebarkan informasi yang tidak benar, yang dapat merusak proses diskusi demokratis. Karena itu, meningkatkan literasi kewarganegaraan tidak bisa hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas saja, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan pendidikan politik.

Di dunia pendidikan perguruan tinggi, pendidikan politik membantu mahasiswa memahami, memiliki sikap, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia politik nyata. PPKn memberikan dasar teori mengenai demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, serta nilai-nilai negara. Tapi, efektivitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, melainkan cara mahasiswa terlibat aktif dalam belajar melalui diskusi, refleksi, dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi cara penting untuk memperkuat literasi kewarganegaraan yang kritis, menggali perasaan, dan berdasarkan tindakan.

Dalam konteks meningkatkan literasi kewarganegaraan di masa digital, pemikiran Fadil Mas'ud, (2025) memberikan dasar penting mengenai bagaimana dunia digital membentuk cara warga negara memahami, menciptakan, dan menyebarkan narasi kebangsaan. Mas'ud menekankan bahwa ruang digital telah menjadi tempat baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pendidikan politik harus membentuk kompetensi etis dan kritis dalam berinteraksi di ruang publik. Ia juga menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman nilai di ruang virtual, mendorong warga negara bersikap inklusif, berpikir kritis, dan mampu memilah informasi sebelum terlibat dalam diskusi politik. Temuan ini relevan bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan kini tidak cukup hanya berdasar teks dan konsep, tetapi harus berfokus pada keahlian digital, terutama kemampuan menavigasi informasi, memahami dinamika ruang publik virtual, serta menunjukkan tanggung jawab moral dalam interaksi online. Dengan demikian, mengintegrasikan pendidikan politik sangat penting untuk membekali mahasiswa PPKn agar bisa berperan aktif dan beretika di tengah kompleksitas dunia digital saat ini (Mas'ud, 2025).

Dari sudut pandang teoritis, literasi kewarganegaraan memiliki tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan meliputi pemahaman tentang dunia politik, keterampilan mencakup kemampuan menganalisis dan berpartisipasi, sedangkan sikap mencerminkan nilai dan komitmen etis. Menurut (OECD, 2018), generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kesadaran akan tanggung jawab kewarganegaraan yang kuat agar mampu menghadapi dunia digital secara efektif serta terhindar dari penipuan informasi. Dengan demikian, literasi sipil menjadi dasar penting bagi mahasiswa PPKn sebagai calon pendidik. Pendidikan politik dianggap sebagai proses pembelajaran yang bertujuan membentuk pemahaman, sikap, dan keterampilan berpolitik agar warga negara dapat berpartisipasi dengan sadar dan bertanggung jawab (Almond & Verba, 1989).

Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan politik tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap kondisi sosial dan politik (Budimansyah, 2010). Bentuk pendidikan politik yang efektif bisa berupa diskusi isu publik, simulasi politik, serta keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan yang partisipatif dan reflektif (Branson, 1998). Hubungan pendidikan politik dan literasi kewarganegaraan bersifat saling memperkuat. Pendidikan politik terbukti mampu meningkatkan pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), memperkuat partisipasi, dan mendorong keterlibatan politik warga negara (Galston, 2001); (Niemi & Junn, 1998). Bagi mahasiswa PPKn, pendidikan politik tidak hanya meningkatkan

literasi kewarganegaraan dasar, tetapi juga melatih kemampuan argumentasi publik, deliberasi, dan advokasi. Dengan demikian, pendidikan politik berperan sebagai penggerak penting dalam memperkuat literasi kewarganegaraan secara komprehensif.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi politik generasi muda, termasuk mahasiswa, masih rendah, terutama dalam hal partisipasi politik dan pemahaman terhadap kebijakan publik. Penelitian internasional seperti ICCS menunjukkan bahwa kemampuan kewarganegaraan peserta didik, termasuk di Indonesia, cenderung rendah. Penelitian lain tentang pendidikan politik juga menyatakan bahwa pendekatan demokratis dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman kewarganegaraan (Geboers et al., 2013). Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum fokus pada peran pendidikan politik dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan mahasiswa PPKn sebagai calon guru. Itulah celah yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

Celah ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pendidikan politik dijalani dan dipahami oleh mahasiswa PPKn, sehingga bisa memperkuat pemahaman mereka tentang kewarganegaraan. Penelitian ini menempatkan mahasiswa PPKn bukan hanya sebagai penerima materi, tapi juga sebagai bagian aktif dalam sistem pendidikan kewarganegaraan melalui proses belajar formal, interaksi sosial, serta pemikiran kritis terhadap isu kebangsaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membentuk generasi pendidik yang memiliki literasi kewarganegaraan kuat, agar demokrasi Indonesia tetap inklusif dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Masalah yang dibahas dalam penelitian meliputi tingkat literasi kewarganegaraan mahasiswa di mata kuliah PPKn, peran pendidikan politik dalam meningkatkan literasi tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendidikan politik di perguruan tinggi. Literasi kewarganegaraan menjadi pondasi utama dalam membentuk warga negara yang cerdas dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis (Branson, 1998); (Kerr, 2002). Dalam konteks mahasiswa, tingkat literasi kewarganegaraan mereka dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan politik, akses terhadap informasi, dan kualitas pembelajaran PPKn yang diterima (Ichsan, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pendidikan politik dalam memperkuat literasi kewarganegaraan, mengidentifikasi praktik pendidikan politik yang efektif, serta merumuskan strategi pengembangan literasi kewarganegaraan yang sesuai dengan tantangan demokrasi masa kini. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterlibatan politik mahasiswa (Galston, 2001); (Print, & Lange, 2012). Lebih lanjut, pembelajaran PPKn yang dirancang dengan pendekatan nilai dan karakter terbukti mampu memperkuat kemampuan kewarganegaraan mahasiswa (Budimansyah & Suryad, 2008); (Winataputra, 2011).

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian akademik, memperkuat metode pengajaran PPKn, serta menjadi dasar inovasi pembelajaran dalam membentuk calon pendidik yang berkualitas. Strategi untuk memperkuat literasi kewarganegaraan juga perlu mempertimbangkan dinamika di era digital dan kondisi demokrasi saat ini sebagaimana dijelaskan oleh (Hoskins & Deakin Crick, 2010) dan (Sari, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literasi kewarganegaraan dan praktik pendidikan politik di perguruan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail cara memperkuat literasi kewarganegaraan melalui pendidikan politik di lingkungan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna, proses, dan pengalaman sosial secara alami tanpa mengubah atau mengatur variabel penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini tidak menargetkan uji hipotesis, melainkan fokus pada penyajian gambaran yang sistematis dan reflektif terhadap fenomena yang terjadi, seperti yang dijelaskan oleh (Sandelowski, 2000), bahwa penelitian deskriptif kualitatif memberikan gambaran faktual dan interpretasi tentang realitas sosial. Subjek penelitian mencakup berbagai dokumen akademik, seperti kurikulum, Rencana

Pembelajaran Semester (RPS), modul pembelajaran, laporan kegiatan kemahasiswaan, serta hasil karya akademik mahasiswa yang terkait dengan pendidikan politik dan literasi kewarganegaraan.

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan tingkat kedekatannya terhadap fenomena yang diteliti. Seperti yang dijelaskan oleh (Patton, 2015), sumber data yang relevan mencakup literatur akademik, data empiris berbasis dokumen, konteks sosial yang memengaruhi proses pembelajaran, arsip institusional, serta kebijakan yang mengatur pelaksanaan pendidikan politik di perguruan tinggi. Dengan demikian, setiap dokumen yang dipilih tidak hanya sesuai dengan tema penelitian, tetapi juga mengandung informasi yang berharga untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana literasi kewarganegaraan dibentuk, dipraktikkan, dan dikembangkan dalam lingkungan akademik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak dilakukan melalui wawancara, melainkan melalui analisis dokumen, observasi tidak langsung, dan studi literatur. Analisis dokumen digunakan untuk meneliti struktur kebijakan, desain kurikulum, dan materi pembelajaran yang membingkai praktik pendidikan politik; observasi tidak langsung dilakukan melalui penelaahan jejak kegiatan mahasiswa, dokumentasi pembelajaran, serta laporan aktivitas kokurikuler untuk memahami bagaimana praktik itu berlangsung dalam konteks nyata; sedangkan studi literatur digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis dan menghubungkan temuan dengan penelitian sebelumnya. Ketiga teknik pengumpulan data ini saling melengkapi, sehingga proses analisis mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai mekanisme institusional serta praktik pedagogis yang berkontribusi pada pengembangan literasi kewarganegaraan mahasiswa PPKn.

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan wawancara, data yang digunakan tetap valid karena diuji melalui analisis dokumen dan pendekatan triangulasi dari berbagai sumber seperti kurikulum, RPS, modul pembelajaran, laporan kegiatan, serta karya akademik mahasiswa. Menurut (Patton, 2015), sumber yang relevan adalah yang mampu menjelaskan fenomena secara langsung. Oleh karena itu, berbagai dokumen tersebut menjadi dasar untuk menilai praktik pendidikan politik dan literasi kewarganegaraan. Tingkat literasi mahasiswa bisa dilihat dari kualitas tugas akademik, materi dalam kurikulum, dan aktivitas kemahasiswaan yang mencerminkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kewarganegaraan. Dengan demikian, penelitian ini tetap menghasilkan data yang valid meskipun tidak melalui wawancara.

Selain itu, studi literatur digunakan untuk memperkuat dasar teori tentang literasi kewarganegaraan, pendidikan politik, serta karakteristik pembelajaran PPKn. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari (Miles et al., 2014), yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data disaring dan dipilih informasi relevan serta penting. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan kategori tematik agar memudahkan interpretasi yang lebih dalam. Setelah itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dengan memastikan konsistensi antara data dan fokus penelitian.

Untuk memastikan kepastian data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai jenis dokumen, catatan pengamatan, dan literatur agar temuan tetap konsisten (Creswell, 2014).

Peneliti juga mencatat audit trail berupa dokumen lengkap mengenai proses analisis agar seluruh langkah penelitian dapat dilihat secara transparan. Selain itu, dilakukan peer debriefing melalui diskusi dengan dosen pembimbing atau rekan sejawat untuk memeriksa kesahihan argumentasi dan validitas interpretasi data. Dengan proses ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat dipercaya, objektif, dan bisa dijelaskan secara jelas mengenai peran pendidikan politik dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan mahasiswa PPKn.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran nyata dan praktis mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman kewarganegaraan. Pendekatan ini juga memberikan refleksi yang berguna untuk meningkatkan proses belajar di lingkungan perguruan tinggi. Metode ini mendukung pencapaian tujuan penelitian, yaitu menganalisis secara menyeluruh praktik pendidikan politik serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai dokumen seperti kurikulum Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), RPS mata kuliah, materi ajar, laporan kegiatan kemahasiswaan, serta analisis karya ilmiah mahasiswa, terdapat tiga temuan utama yang menjawab permasalahan mengenai bagaimana pendidikan politik diimplementasikan dan upaya peningkatan literasi kewarganegaraan. Ketiga temuan tersebut meliputi: (1) cara pendidikan politik dilakukan dalam proses pembelajaran PPKn, (2) dampak pendidikan politik terhadap peningkatan literasi kewarganegaraan, dan (3) faktor-faktor yang mendukung maupun menghalangi upaya peningkatan literasi tersebut. Aktivitas literasi yang ditemukan dalam dokumen mencakup pembacaan dan analisis teks politik seperti konstitusi, undang-undang, dan artikel ilmiah tentang demokrasi; diskusi kelas terkait isu-isu politik aktual; penugasan berupa esai, studi kasus, dan refleksi; serta kegiatan praktis seperti simulasi pemilu, debat kebijakan publik, dan terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Aktivitas-aktivitas tersebut membantu memperkuat literasi kewarganegaraan mahasiswa melalui peningkatan pengetahuan politik, kemampuan berpikir kritis, serta perkembangan sikap demokratis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan melalui pembelajaran di kelas maupun kegiatan nonformal di lingkungan kemahasiswaan memegang peran penting dalam membentuk pemahaman kewarganegaraan secara menyeluruh. Temuan ini selaras dengan pendapat (Almond & Verba, 1989) serta (Branson, 1998) yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika demokrasi di kampus karena membantu meningkatkan pengetahuan politik, kemampuan berpikir kritis, serta sikap warga negara yang bertanggung jawab. Pendekatan ini juga sesuai dengan pandangan (Print, 2007) yang menyatakan bahwa berbagai aktivitas pembelajaran seperti diskusi isu publik dan praktik organisasi mahasiswa dapat memperkuat literasi kewarganegaraan secara nyata.

Praktik Pendidikan Politik dalam Pembelajaran PPKn

Analisis terhadap RPS menunjukkan bahwa sekitar 80% dari mata kuliah inti PPKn menyertakan capaian pembelajaran yang berkaitan langsung dengan literasi politik dan kewarganegaraan, seperti pemahaman nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, hak serta kewajiban warga negara, dan kemampuan menganalisis kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik sudah terintegrasi dengan baik dalam kurikulum PPKn. Hal ini sesuai dengan pendapat (Heater, 2004) yang menyatakan bahwa kurikulum kewarganegaraan yang baik harus mencakup aspek politik agar dapat membentuk warga negara yang demokratis.

Dalam proses pembelajaran, dosen memberikan berbagai aktivitas yang berbasis isu, seperti menganalisis kasus politik terkini, mendiskusikan kontroversi kebijakan publik di kelas, membuat infografis politik, serta memberikan presentasi tentang situasi demokrasi di Indonesia. Model pembelajaran ini menunjukkan penerapan pendekatan *issue-centered learning*, yang menurut (Kahne, & Westheimer, 2015) berhasil meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa karena mereka secara langsung terlibat dalam menganalisis isu-isu publik secara kritis.

Dokumen materi ajar menunjukkan bahwa dosen sering mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik terbaru, seperti dinamika pemilu, politik identitas, korupsi dalam politik, serta tantangan terkait demokrasi digital. Cara ini sesuai dengan pemikiran (Dewey, 1987) yang menekankan bahwa pembelajaran politik harus terhubung dengan situasi nyata yang dialami oleh para peserta didik, agar proses belajarnya memiliki arti yang dalam.

Selain pembelajaran formal di dalam kelas, laporan kegiatan organisasi kemahasiswaan juga mencakup berbagai bentuk kegiatan pendidikan politik, seperti forum diskusi kebangsaan, seminar tentang demokrasi, pelatihan pemilu, hingga program relawan pemantau pemilu. Kegiatan-kegiatan ini adalah contoh pembelajaran politik secara informal yang membantu memperkuat pengalaman politik para mahasiswa di luar lingkungan kelas (Youniss, 2011). Dengan demikian, lingkungan pembelajaran PPKn secara menyeluruh menyediakan berbagai ruang bagi mahasiswa untuk memahami politik dari berbagai sudut pandang dan dimensi.

Penguatan Literasi Kewarganegaraan Mahasiswa

Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis isu dan kegiatan kemahasiswaan memiliki peningkatan signifikan dalam literasi kewarganegaraan

mereka. Perubahan ini terlihat dari tiga aspek utama yaitu pengetahuan politik, keterampilan kewarganegaraan, serta sikap atau disposisi kewarganegaraan.

Karya akademik yang dibuat oleh mahasiswa seperti makalah, opini ilmiah, dan artikel jurnal menunjukkan bahwa mereka semakin memahami berbagai konsep penting seperti demokrasi deliberatif, hak asasi manusia, kebijakan publik, dan sistem politik Indonesia. Mereka mampu menjelaskan konsep tersebut secara jelas dan menerapkannya dalam menganalisis berbagai isu sosial. Menurut pendapat (Kahne & Sporte, 2008), pengetahuan politik merupakan dasar untuk membentuk warga negara yang memiliki literasi politik tinggi.

Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa semakin terampil dalam mengenali isu publik, menganalisis argumen, serta menawarkan solusi berdasarkan data dan teori. Dalam diskusi kelas, mereka menunjukkan kemampuan berargumentasi secara kritis, seperti dalam menelaah isu politik identitas, masalah disinformasi politik, atau dinamika kebijakan pendidikan. Data dari berbagai dokumen menunjukkan bahwa tugas analisis isu, esai reflektif, serta penilaian berbasis proyek secara konsisten mencakup indikator berpikir kritis, seperti penggunaan sumber yang dapat dipercaya, argumen yang logis, serta penilaian etis terhadap keputusan politik. RPS dan modul pembelajaran juga secara jelas menyebutkan capaian pembelajaran terkait kemampuan analisis isu kewarganegaraan, termasuk penilaian berbasis studi kasus dan debat akademik. Hal ini sejalan dengan konsep critical civic literacy menurut (Westheimer & Kahne, 2015), yang menempatkan keterampilan berpikir kritis sebagai bagian inti dari literasi kewarganegaraan tingkat tinggi.

Sikap kewarganegaraan mahasiswa dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan forum demokrasi di kampus. Mereka menunjukkan perhatian terhadap isu publik, siap berdiskusi, serta menghargai nilai-nilai demokrasi. Menurut Youniss (2011), pengalaman seperti ini merupakan bagian penting dalam membentuk identitas kewarganegaraan yang lebih matang. Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas literasi kewarganegaraan mahasiswa PPKn.

Faktor Pendukung dalam Penguatan Literasi Kewarganegaraan

Peningkatan literasi kewarganegaraan mahasiswa bergantung pada kurikulum yang terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan, terutama yang mencakup analisis isu politik sebagai kemampuan penting. Kurikulum seperti ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami dinamika politik secara mendalam, seperti yang ditulis oleh (Print, & Lange, 2012). Selain itu, suasana belajar yang dialogis dalam mata kuliah PPKn, melalui diskusi kelompok, seminar, dan forum ilmiah, membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu sosial. Faktor pendukung lainnya adalah kemampuan dosen dalam menggunakan metode pembelajaran reflektif seperti studi kasus dan proyek, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan kondisi nyata. Akses informasi digital juga memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan politik terbaru. Kombinasi faktor-faktor ini memperkuat pembentukan literasi kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan demokrasi modern.

Faktor Hambatan Peningkatan Literasi Kewarganegaraan

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan literasi kewarganegaraan mahasiswa masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam maupun luar. Variasi motivasi mahasiswa menjadi hambatan utama, karena tidak semua mahasiswa memiliki minat tinggi terhadap analisis politik secara mendalam. Selain itu, ketidakaktifan dalam diskusi mengurangi proses belajar yang seharusnya melatih partisipasi aktif dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini diperburuk oleh banyaknya informasi yang tidak akurat dan berita palsu di media sosial, yang dapat memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu publik. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Kahne & Bowyer, 2017) yang menunjukkan bahwa informasi palsu di dunia digital menjadi tantangan besar dalam pembentukan literasi politik generasi muda.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kerja sama dengan lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, dan berbagai lembaga swadiri masyarakat, sehingga mahasiswa tidak memperoleh pengalaman politik nyata. Keterbatasan pengalaman lapangan ini membuat proses pembelajaran kewarganegaraan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata. Keseluruhan hambatan

tersebut menunjukkan perlunya strategi pendidikan yang lebih adaptif serta dukungan dari lembaga yang lebih kuat agar upaya peningkatan literasi kewarganegaraan dapat lebih efektif dan menyeluruh.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran politik bagi mahasiswa mata kuliah PPKn tidak hanya berupa penjelasan teori, tetapi juga melalui berbagai kegiatan belajar yang berbentuk diskusi, sesuai dengan konteks, dan bisa diterapkan langsung. Capaian pembelajaran dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memfokuskan pada analisis isu politik, nilai demokrasi, dan pemahaman hak serta kewajiban warga negara menjadi dasar dalam mengimplementasikan pembelajaran politik. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan demokratis bisa berjalan dengan baik jika peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan masyarakat (Dewey, 1987). Metode pembelajaran berbasis isu memungkinkan mahasiswa menghubungkan konsep politik dengan situasi sosial yang sedang berlangsung. Tugas analisis kasus, debat di dalam kelas, serta presentasi isu publik menciptakan ruang belajar yang mengutamakan proses berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Pembelajaran politik juga terjadi melalui kegiatan organisasi mahasiswa, forum kebangsaan, dan partisipasi dalam pengawasan pemilu. Aktivitas-aktivitas ini mendukung argumen bahwa pembelajaran politik dalam konteks PPKn bersifat integratif: tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga terwujud di ruang publik kampus yang demokratis (Youniss, 2011). Keterlibatan mahasiswa dalam forum demokrasi kampus sangat berpengaruh dalam membentuk identitas mereka sebagai warga negara dan memperdalam proses belajar kewarganegaraan.

Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran politik memberikan dampak nyata terhadap peningkatan literasi kewarganegaraan mahasiswa. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari pemahaman pengetahuan (Kahne & Sporte, 2008), tetapi juga kemampuan analitik, penggunaan bahasa politik yang tepat dalam karya akademik, serta keberanian untuk terlibat dalam diskusi publik atau forum. Proses peningkatan literasi kewarganegaraan ini mencakup gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membentuk kapasitas kewarganegaraan mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya memahami struktur politik (Almond & Verba, 1989), tetapi juga mampu menganalisis isu, mengevaluasi kebijakan, serta membangun argumen yang kuat dan berdasar. Melalui pembelajaran berbasis isu, mahasiswa belajar mengenali bias, membangun argumen, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Kombinasi antara aktivitas pembelajaran PPKn dan kegiatan non-akademik membentuk siklus pembelajaran kewarganegaraan yang berkelanjutan: mahasiswa memperoleh pengetahuan, mengembangkan konsep melalui tugas analitis, dan memperdalam pemahaman tersebut melalui partisipasi di ruang publik kampus (Niemi & Junn, 1998). Dengan demikian, literasi kewarganegaraan mahasiswa PPKn terbukti berkembang melalui pengalaman belajar yang tidak hanya melibatkan pemahaman, tetapi juga praktik, refleksi, serta interaksi sosial.

Faktor-faktor yang mendukung hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi kewarganegaraan mahasiswa dipengaruhi oleh kerjasama antara kurikulum, cara mengajar, dan budaya akademik. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan (PPKn) yang fokus pada analisis masalah memberikan panduan jelas dalam membentuk kemampuan kewarganegaraan mahasiswa (Print, & Lange, 2012). Di sisi lain, peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran sangat penting, karena mereka mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, merenungkan, dan menanyakan isu-isu politik secara adil. Lingkungan akademik PPKn yang penuh diskusi dan aktivitas intelektual menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan memutuskan sesuatu, hal yang penting dalam membentuk warga negara yang kritis (Branson, 1998). Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang bisa mengurangi efektivitas peningkatan literasi kewarganegaraan. Hambatan tersebut meliputi semangat belajar yang rendah pada sebagian mahasiswa, sikap pasif saat berdiskusi, serta informasi digital yang bias dan tidak dapat dipercaya. Informasi politik yang tidak akurat dapat melemahkan kualitas literasi kewarganegaraan karena membentuk pandangan politik yang salah (Kahne & Bowyer, 2017). Dalam konteks ini, bias informasi di media sosial menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pendidikan literasi digital politik dalam kurikulum PPKn. Kurangnya kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjadi hambatan dari dalam yang membatasi akses mahasiswa kepada pengalaman politik yang asli. Padahal, pengalaman langsung dalam aktivitas demokrasi formal merupakan faktor penting dalam membentuk ikatan warga negara yang benar (Galston, 2001). Secara umum, hasil

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pembelajaran berdasarkan isu dalam pendidikan kewarganegaraan (Geboers et al., 2013). Pembelajaran yang melibatkan partisipasi warga negara membantu meningkatkan kemampuan analitis dan partisipasi politik mahasiswa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan politik di PPKn sudah sangat praktis, karena menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman nyata mahasiswa dalam kegiatan demokrasi kampus. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan menunjukkan bahwa pendidikan politik di PPKn lebih baik dibandingkan program studi lain, baik dalam aspek pemahaman maupun tindakan.

Penelitian ini memiliki dampak teoretis yang bisa memperkuat dasar konsep dalam bidang studi pendidikan politik dan literasi kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan sebab-akibat yang konsisten antara pendidikan politik dengan peningkatan literasi kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini membuka pemahaman lebih luas tentang literasi kewarganegaraan sebagai konsep yang memiliki berbagai aspek, seperti pengetahuan politik, kemampuan berpikir kritis, pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan, serta partisipasi sosial dan politik (Hoskins et al., 2011). Hasil penelitian juga menambah wawasan dalam teori pendidikan politik, karena menunjukkan bahwa pembentukan literasi kewarganegaraan tidak hanya terjadi melalui materi pelajaran (Budimansyah, 2010), tetapi juga melalui interaksi sosial, dinamika dalam kelompok, dan aktivitas partisipatif di lingkungan kampus. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya melihat pendidikan politik sebagai proses yang menyeluruh, yang mencakup pengalaman belajar formal dan nonformal untuk membentuk warga negara yang kritis dan aktif.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan langsung untuk meningkatkan pemahaman kewarganegaraan para mahasiswa. Pertama, perlu dilakukan peningkatan penggunaan metode pembelajaran berbasis isu. Hal ini bisa membantu mahasiswa lebih mampu menganalisis dinamika politik secara kritis (Westheimer & Kahne, 2015). Selain itu, penting juga memperkuat kemampuan literasi digital politik, agar mahasiswa bisa mengenali bias dan informasi tidak benar yang bisa mengganggu pemahaman kewarganegaraan secara tepat (OECD, 2018). Di sisi lain, penelitian ini menyarankan adanya kerja sama dengan lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini akan memberikan pengalaman politik nyata bagi mahasiswa. Selain itu, diperlukan pengembangan forum diskusi di lingkungan kampus untuk membantu mahasiswa berlatih berdebat, berdialog, dan mengambil keputusan secara logis. Dengan langkah-langkah tersebut, proses pendidikan politik bisa lebih praktis dan efektif dalam membangun kemampuan kewarganegaraan secara menyeluruh.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan para mahasiswa. Pendidikan politik tidak hanya disampaikan melalui materi teori, tetapi juga melalui pengalaman belajar yang berupa diskusi, kritis, dan penerapan langsung. Metode seperti diskusi mengenai isu, proyek kewargaan, serta partisipasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi terbuka terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir analitis, kesadaran politik, serta pemahaman tentang nilai-nilai demokratis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan tumbuh ketika mahasiswa diberikan ruang untuk berpikir sendiri, berinteraksi dengan orang lain, serta menerapkan konsep kewargaan secara nyata.

Peningkatan literasi kewarganegaraan ini merupakan proses yang kompleks, dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dosen, dukungan dari kurikulum, serta lingkungan akademik yang demokratis. Faktor luar seperti dinamika sosial dan politik di sekitar lingkungan kampus juga turut memengaruhi proses tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan membutuhkan sistem pendidikan politik yang nyaman, kolaboratif, dan berorientasi pada praktik nyata. Ketika pendidikan politik dilaksanakan secara transformatif, mahasiswa tidak hanya memahami struktur politik, tetapi juga bisa menilai isu publik secara kritis dan berpartisipasi dalam ruang demokratis dengan tanggung jawab. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan

politik dalam konteks PPKn memainkan peran penting dalam membentuk warga negara muda yang literat, reflektif, dan aktif dalam kehidupan sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan literasi kewarganegaraan melalui pendidikan politik di kalangan mahasiswa PPKn. Pertama, bagi institusi pendidikan, dianjurkan untuk terus memperluas dan mengembangkan kurikulum PPKn dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis isu-isu aktual dan sesuai dengan konteks nyata. Kurikulum ini juga sebaiknya mengintegrasikan pendidikan literasi digital dalam politik untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan informasi palsu dan bias yang sering muncul di dunia digital. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga demokrasi seperti KPU dan Bawaslu, serta organisasi masyarakat sipil agar mahasiswa memiliki kesempatan praktik langsung dalam berbagai kegiatan demokratis.

Kedua, bagi para dosen dan praktisi pendidikan PPKn, diharapkan untuk lebih memanfaatkan metode pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan partisipatif agar mahasiswa terlibat secara aktif dalam berpikir kritis dan berargumen secara konstruktif. Pemanfaatan simulasi politik, debat, serta forum diskusi publik perlu diperkuat sebagai sarana pengembangan keterampilan warga negara. Dosen juga perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa agar berbagai hambatan seperti sikap pasif dapat diminimalisir.

Ketiga, bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian, diusulkan untuk melakukan riset yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendidikan politik secara kuantitatif dengan melibatkan sampel yang lebih banyak dan beragam. Penelitian ini juga sebaiknya mengeksplorasi pengaruh faktor eksternal seperti media sosial terhadap peningkatan literasi kewarganegaraan. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai strategi penguatan literasi digital dalam politik juga perlu dikembangkan sebagai bentuk respons terhadap berbagai tantangan informasi di dunia digital.

Keempat, pengembangan teori pendidikan politik dan literasi kewarganegaraan perlu terus diperluas dengan memperhatikan kondisi sosial-politik lokal serta dinamika internasional. Kajian interdisipliner yang menggabungkan bidang pendidikan, komunikasi, dan teknologi informasi seharusnya dapat menghasilkan paradigma baru yang lebih adaptif sekaligus relevan untuk mendukung pengembangan warga negara yang kritis dan aktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penelitian ini berlangsung. Kami menyampaikan apresiasi khusus kepada fakultas dan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah membantu proses pengumpulan data. Kami juga menghargai bimbingan dan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Sage Publications.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan karakter: Konsep dan implementasi dalam pembelajaran PPKn*. Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Suryad, K. (2008). *Pendidikan nilai: Kajian teori dan praktik di sekolah*. UPI Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* ((4th ed.). SAGE Publications.
- Dewey, J. (1987). *Experience and education*. Macmillan.

- Galston, W., A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4, 217-234. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217>
- Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2013). Review of the effects of citizenship education. *Educational Research Review*, 9, 158-173. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.02.001>
- Heater, D. (2004). *A history of education for citizenship*. Routledge.
- Hoskins, B., & Deakin Crick, R. (2010). *Competences for learning to learn and active citizenship: Different currencies or two sides of the same coin?* *European Journal of Education*, 1(45), 121-137. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01419>
- Hoskins, B., Villalba, E., Van Nijlen, D., & Barber, C. (2011). Measuring civic competence in Europe. *Studies in Educational Evaluation*, 3(37), 108-121.
- Ichsan, I. Z. (2019). The role of learning resources in improving civic literacy in higher education. *Journal of Education and Learning*, 2(13), 234-242. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v13i2.12447>
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age. *American Educational Research Journal*, 1(54), 3-34.
- Kahne, J., & Sporte, S. (2008). Developing citizens. *American Educational Research Journal*, 3(45), 738-766.
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2015). Eaching democracy. *Phi Delta Kappan*, 6(97), 34-40.
- Kerr, D. (2002). Citizenship education: An international comparison. *International Journal of Social Education*, 1(16), 1-12.
- Mas'ud, F. (2025). Ekosistem digital dan narasi kebangsaan: Relevansi Pancasila sebagai penuntun etika publik virtual. *Haumeni Journal of Education*, 2(1), 45-60. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/haumeni/article/view/21505>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Milner, H. (2010). *The Internet generation: Engaged citizens or political dropouts?* University Press of New England.
- Niemi, R. G., & Junn, J. (1998). *Ivic education: What makes students learn*. Yale University Press.
- OECD. (2018). *Preparing our youth for an inclusive and sustainable world: The OECD PISA global competence framework*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Print, M. (2007). *Civic education and youth participation*. University of Sydney. https://www.researchgate.net/publication/292147040_Civic_Education_and_Youth_Participation
- Print, M., & Lange, D. (2012). *Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens*. Springer.
- Sandelowski, M. (2000). *Whatever happened to qualitative description?* *Research in Nursing & Health*, 4(23), 334-340.
- Sari, N. (2020). Digital literacy and civic engagement among youth in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(10), 45-56. <https://doi.org/10.20527/jpk.v10i2.9123>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2015). *What kind of citizen?* *American Educational Research Journal*, 2(52), 237-269.
- Winataputra, U. S. (2011). *Teori dan praktik pendidikan kewarganegaraan*. Universitas Terbuka.
- Youniss, J. (2011). Civic education. *Applied Developmental Science*, 2(15), 98-103.